

GUNTINGAN BERITA

KODE DOK	HARIAN/MAJALAH/BULETIN/KANTOR BERITA	HALAMAN	TANGGAL
TAMB	NERACA	10	21-8-2002

■ Pertambangan

Jatam Setuju Penambangan di Teluk Palu Dihentikan

Jakarta, NERACA

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendukung Petisi Komite Rakyat Korban Tambang (Terkam) agar praktek penambangan galian C yang terjadi di sepanjang pesisir Teluk Palu dihentikan, serentak terhadap 21 pemilik izin penambangannya, secepatnya dicabut. Pasalnya, selain terbukti telah merusak lingkungan dan penghancuran ekosistem di kawasan tersebut, praktek penambangan tersebut juga telah menyingkirkan hak agraria rakyat.

Dalam pernyataan tertulisnya yang disampaikan kepada *Neraca* tadi malam, Media dan Publikasi Tambang Jatam, Aminudin, mengungkapkan, dari sisi ekonomi, masyarakat yang berada di lokasi sekitar perusahaan tambang, justru mengalami pemiskinan, akibat lahan dan sumber daya alam yang selama ini menjadi gantungan hidupnya tidak bisa lagi mereka manfaatkan.

"Sesuatu yang ironis di balik gembar-gembor perusahaan yang selalu menawarkan kesejahteraan dan kemakmuran. Masyarakat juga dihadapkan pada ancaman konflik sosial akibat perusahaan tambang melakukan adu domba antarmasyarakat," kata Aminudin, yang secara khusus mengirimkan

surat dukungan Jatam kepada Terkam kepada Presiden Megawati Soekarnoputri.

Dia menambahkan, fakta riil akibat penambangan galian tersebut kini tengah mengena sebagian besar masyarakat yang tinggal di lembah pegunungan sepanjang pesisir Teluk Palu. Eksploitasi tambang galian C yang dilakukan sedikitnya oleh 21 perusahaan di 14 desa yang berbeda, menyebabkan kerusakan lingkungan, pelanggaran HAM, pemiskinan penduduk, dan konflik antarmasyarakat.

Dengan munculnya berbagai dampak negatif dari kegiatan penambangan yang serampangan itu, menurut Aminudin, Jatam mendesak Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Pemda Kabupaten Donggala dan Pemda Kota Palu, untuk segera mencabut izin operasi penambangan yang dilakukan oleh perusahaan di sepanjang pesisir teluk Palu sampai ada pembahasan yang serius serta kesepakatan-kesepakatan baru yang dibuat bersama dengan masyarakat korban tambang.

Di samping itu, Jatam juga meminta perusahaan tambang yang sementara melaksanakan aktivitas penambangannya di sepanjang pesisir teluk Palu untuk meng-

hentikan operasi penambangan-nya sampai ada pembahasan yang serius serta kesepakatan-kesepakatan baru yang dibuat bersama dengan masyarakat korban tambang.

"Kami juga menuntut perusahaan supaya melakukan rehabilitasi terhadap semua kerusakan lingkungan yang terjadi, dan memberi ganti rugi atas hilangnya lahan perkebunan milik masyarakat berikut tanaman yang tumbuh di atasnya dengan ganti rugi yang layak," katanya.

Secara moral, Jatam menyerukan kepada masyarakat korban tambang yang ada di 14 lokasi desa wilayah pesisir teluk Palu untuk terus melakukan perlawanan atas praktek pemiskinan dan penyingkiran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Donggala dan Pemerintah Kota Palu bersama-sama dengan perusahaan penambangan galian C yang ada di wilayah sekitar pesisir teluk Palu.

Neraca mencatat, Jatam merupakan merupakan lembaga swadaya masyarakat yang merupakan *underbouw* dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Organisasi nirlaba ini banyak mengkritisi masalah sosial dan kerusakan lingkungan akibat

kegiatan pertambangan di Indonesia.

Beberapa waktu lalu misalnya, Jatam memediasi masyarakat Poboya-Paneki, Sulawesi Tengah yang menolak wilayahnya yang termasuk dalam Taman Hutan Rakyat (Tahura) dijadikan sebagai lokasi penambangan emas oleh PT Citra Palu Mineral (CPM). Penolakan tersebut selain karena kawasan tersebut masuk dalam wilayah hutan yang dilindungi, juga keberadaan pertambangan diyakini hanya akan membawa banyak petaka ketimbang manfaatnya bagi masyarakat sekitar lokasi tambang tersebut.

Penolakan tersebut, kata Aminuddin, dilakukan secara tertulis yang ditandatangani masyarakat dan sejumlah tokoh masyarakat yang seluruhnya berjumlah 245 orang.

"Mengubah Taman Hutan Rakyat menjadi kawasan pertambangan di wilayah Poboya yang merupakan tanah adat kami, bagi kami sama artinya dengan bencana. Sebab pada kenyataannya, industri pertambangan di manapun berada, selalu berdampak buruk, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Kami tidak menginginkan itu," kata Aminuddin. (31/2)